



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TUGAS AKHIR****KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM  
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI  
KANTOR UNIT PELAKSANAAN TEKNISI (UPT)  
PENGELOLAAN PENDAPATAN TEMBILAHAN  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI RIAU***Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)***OLEH****NUR'AINUN  
01770423432****PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU****2020**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**

NAMA : NUR'AINUN  
 NIM : 01770423432  
 PROGRAM STUDI : DIPLOMA III AKUNTANSI  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 JUDUL : **KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
 DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI  
 DAERAH DI KANTOR UNIT PELAKSANAAN  
 TEKNISI (UPT) PENGELOLAAN PENDAPATAN  
 TEMBILAHAN BADAN PENDAPATAN DAERAH  
 PROVINSI RIAU**

Setelah kami teliti dan memberikan bimbingan sebagaimana mestinya, maka kami akan berpendapat bahwa laporan ini sudah disetujui.

Pekanbaru, 16 Mei 2020

DISETUJUI OLEH

PEMBIMBING

**Febri Rahmi SE, M.Sc, Ak, CA**  
**NIP. 19720209 200604 2 002**

MENGETAHUI

DEKAN

KA. PRODI

**Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM**  
**NIP. 19620512 198903 1 003**

**Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak**  
**NIP. 19741108 200003 2 004**



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : NUR'AINUN  
 NIM : 01770423432  
 PROGRAM STUDI : DIPLOMA III AKUNTANSI  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 JUDUL : KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM  
 MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI  
 KANTOR UNIT PELAKSANAAN TEKNISI (UPT)  
 PENGELOLAAN PENDAPATAN TEMBILAHAN BADAN  
 PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU  
 HARI/TANGGAL : Selasa, 19 Mei 2020

DISAHKAN OLEH

TIM PENGUJI

Ketua  


Dr. Mahendra Romus, SP, M, Ec  
 NIP. 19711119 200501 1 004

Anggota

Penguji I



Dr. Mulya Sosiady, SE, MM, Ak, CA  
 NIP. 19761217 200901 1 014

Penguji II



Andri Novius, S.E., M.Si., Ak, CA  
 NIP. 19781125 200710 1 003

UIN SUSKA RIAU





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **“KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KANTOR UNIT PELAKSANAAN TEKNISI (UPT) PENGELOLAAN PENDAPATAN TEMBILAHAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU”**

OLEH

**NUR'AINUN**  
**01770423432**

*Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memberikan kontribusi cukup besar bagi pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah di Provinsi Riau. PKB dipungut berdasarkan Peraturan Gubernur Riau No. 08 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perhitungan dan pencatatan PKB pada UPT Pengelolaan Pendapatan Tembilahan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Deskriptif Kualitatif yaitu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis, serta menginterpretasikan data sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan masalah yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan dan pencatatan PKB sudah sesuai dengan garis kebijakan pemerintah yang berdasarkan undang-undang yang sudah ditetapkan. Dalam pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang dijalankan lewat UPT Pengelolaan Pendapatan Tembilahan sudah sesuai dengan system dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan sebaliknya dalam pelayanan pemungutan di UPT Pengelolaan Pendapatan Tembilahan terhadap wajib pajak khususnya PKB memberikan pelayanan yang lebih lagi, seperti penyuluhan dan bersosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak.*

**Kata Kunci: Pajak Kendaraan Bermotor, Kontribusi, Perhitungan, Pencatatan**

UIN SUSKA RIAU



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KANTOR UNIT PELAKSANAAN TEKNISI (UPT) PENGELOLAAN PENDAPATAN TEMBILAHAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU”**

Shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah berjuang membawa umatnya dari alam kenistaan dan kebodohan ke alam yang penuh dengan kedamaian dan kebaikan yaitu Islam yang kita miliki seperti sekarang ini.

Penulisan Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selama proses menyelesaikan tugas akhir ini penulis banyak sekali mendapatkan perhatian, bantuan, bimbingan, motivasi, serta masukan-masukan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag selaku Rektor UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau.
  3. Ibu Faiza Muklis, SE,M.Si.Akt selaku Kepala Prodi Diploma III Akuntansi UIN SUSKA Riau.
  4. Ibu Febri Rahmi, S.E.M.Sc.Ak.CA selaku Dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan arahan dalam pembuatan tugas akhir ini.
  5. Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas ekonomi dan ilmu sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di bangku perkuliahan.
  6. Orangtua tercinta papa Yahya dan mama Mardiana yang selalu mendo'akan, memberikan dukungan dan bantuan positif baik secara moril maupun materil.
  7. Kakak dan Adik. Nurmayani, NurAfni, Masyita yang telah menyemangati bahkan ikut membantu pembuatan Tugas Akhir ini
  8. Staff/karyawan di Kantor Unit Pelaksanaan Teknisi (UPT) Pengelolaan Pendapatan Tembilahan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
  9. Teman Spesial Muhamad Yusuf Helmi Pratama yang telah memberikan semangat dan dukungan serta selalu memberikan saran kepada penulis.
  10. Andalusia Squad, Dinda Tri Suci, Emelia Prana Dewi, Fauzi Ramadhan, Intan Danishwara, Rani Asmita, Refni Syintia, Rohman Sofian, Willy Yanti, Yosi Amalia, Yusuf Helmi yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
  11. Teman-Teman seperjuangan di D3 Akuntansi lokal B angkatan 17



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(DEGASIB)

12 Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Tugas Akhir ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya ucapkan terimakasih banyak atas dukungan dan motivasinya.

Pekanbaru, Mei 2020  
Penulis

**NUR'AINUN**

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
 <b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.5 Teknik Analisis Data .....	8
1.6 Prosedur Penelitian .....	9
1.7 Sistematika Penulisan .....	10
 <b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
2.1 Sejarah Kantor .....	11
2.2 Lokasi.....	14
2.3 Visi dan Misi.....	14
2.4 Uraian Tugas.....	15
 <b>BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK</b>	
3.1 Tinjauan Teori.....	20
3.2 Tinjauan Praktek .....	30
 <b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
4.1 Kesimpulan .....	39
4.2 Saran .....	40
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

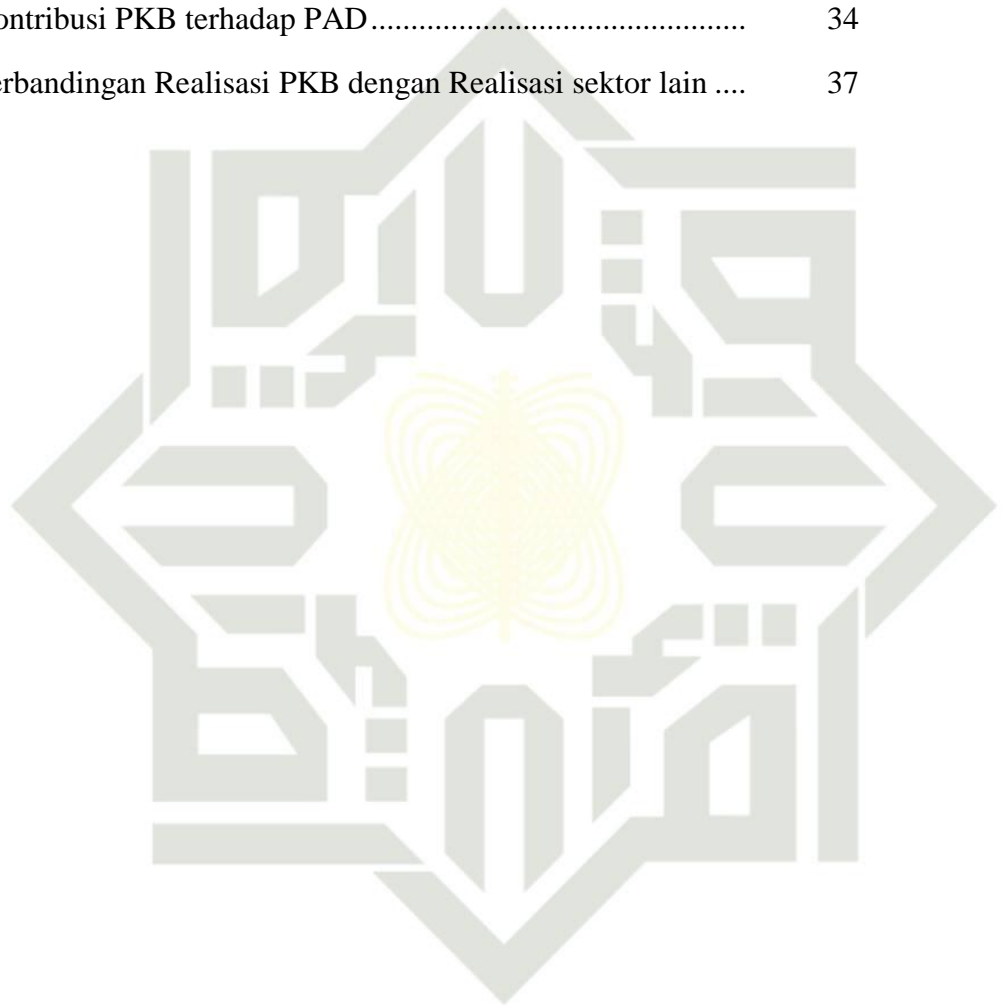


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

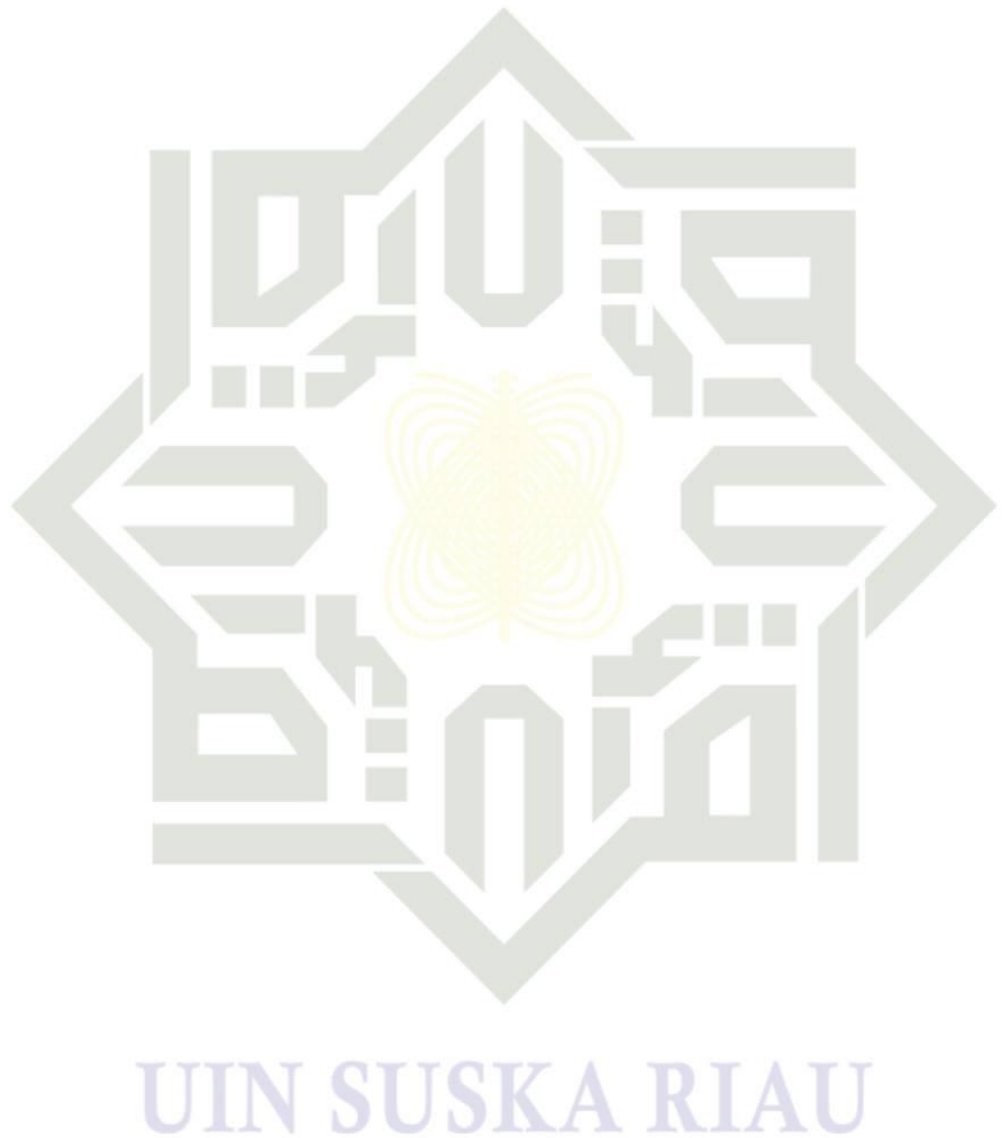
Tabel 1.1	Daftar Jumlah Wajib Pajak dan PKB .....	5
Tabel 3.1	Klasifikasi Kriteria Kontribusi .....	28
Tabel 3.2	Data Target Realisasi Penerimaan PKB .....	33
Tabel 3.3	Kontribusi PKB terhadap PAD .....	34
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi PKB dengan Realisasi sektor lain ....	37



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kantor.....	13
--	----



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Maka, hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Sebagai salah satu visi-misi Joko Widodo pada pemilihan presiden tahun 2014 yaitu pembangunan yang berkelanjutan dimana pembangunan itu bukan hanya di Jawa saja, tetapi juga diluar Jawa diseluruh Indonesia agar pembangunan nantinya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat dan membuka jalur transportasi, industry dan perekonomian sehingga terciptanya kemajuan dan kemamuran diseluruh pelosok daerah nusantara.

Untuk terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan, cepat dan berkelanjutan maka pemerintah Indonesia membuat suatu kebijakan agar suatu daerah bisa mengatur dan menjalankan sendiri daerahnya agar terciptanya percepatan pembangunan dan akses menuju ke daerah lainnya sehingga perekonomian menjadi lancar, kebijakan tersebut sering dinamakan sebagai Otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur, bertanggung jawab dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian otonomi kepada daerah berdasarkan faktor-faktor perhitungan tindakan dan kebijaksanaan yang benar-benar menjamin daerah yang bersangkutan secara nyata dan mengurus rumah tangganya sendiri.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan, bertanggung jawab maksudnya pemberian otonomi itu benar-benar sejalan dengan tujuannya yaitu melancarkan pembangunan yang tersebar dipelosok negara dan daerah serta dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah.

Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi, adalah daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah harus menjadi bagian terbesar dari pendapatan keuangan daerah.

Salah satu pos Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah pajak daerah. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 08 Tahun 2011, Pajak Daerah adalah Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak ini selanjutnya yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau suatu badan ke pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang nantinya iuran tersebut digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah, sebagaimana yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

diartikan Marihot (2013) bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 2 dijelaskan pengelompokan jenis pajak yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok sedangkan Pajak Kabupaten atau Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan Pajak Daerah yang memberikan kontribusi yang cukup besar dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penggunaan Kendaraan Bermotor di Riau dari tahun ke tahun terus meningkat dan menambah keuntungan bagi Pemerintah Daerah dalam penerimaan Pajak. Namun kenyataannya Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Riau masih rendah menurut Nasril selaku juru bicara badan anggaran DPRD Riau saat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

membacakan Laporan Hasil Kerja Pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau terhadap pertanggungjawaban APBD 2018, Senin 29 Juli 2019. Tercatat ada 2,9 juta kendaraan bermotor di Riau. Namun, yang membayar pajak tahunan hanya 1,3 juta kendaraan, atau 44,83 persen, dan 51,17 persen lainnya tak membayarkan pajak tahunan. Menurut hal tersebut dikarenakan minat dan kemauan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) masih sangat rendah, sehingga Badan Pendapatan Daerah maupun Kantor Unit Pelaksanaan Teknisi (UPT) Pengelolaan Pendapatan yang bertugas untuk memungut Pendapatan Daerah atas Pajak Kendaraan Bermotor dituntut untuk melakukan terobosan untuk meningkatkan pendapatan lewat Pajak Kendaraan Bermotor ini.

(<https://medialokal.co/news/detail/9023/daerah/pemilik-kendaraan-bermotor-di-riau-malas-bayar-pajak>).

Salah satu Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Daerah yaitu SAMSAT yang ada di Tembilahan Indragiri hilir sebagai salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau juga terus melakukan inovasi dan terobosan untuk meningkatkan realisasinya Pajak Kendaraan Bermotor yang ada di Kabupaten Indragiri hilir.

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Kabupaten ini memiliki luas  $\pm 12.615 \text{ Km}^2$  dari luas provinsi Riau. Dengan luasnya wilayah kabupaten Indragiri Hilir ini diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah terutama dari sektor pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



daerah. Sehingga ketergantungan kepada pemerintah pusat semakin berkurang.

Adapun jumlah wajib Pajak dan realisasi PKB nya :

**Tabel I.1**  
**Data jumlah Wajib Pajak dan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Unit Pelaksanaan Teknisi (UPT) Pengelolaan Pendapatan Tembilahan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.**

Tahun	Wajib Pajak	Pajak Kendaraan Bermotor
2015	53.638	Rp 15.219.632.550
2016	55.810	Rp 16.890.265.500
2017	57.431	Rp 18.513.252.000
2018	55.632	Rp 19.804.694.631
2019	56.392	Rp 21.326.843.500

*Sumber: Kantor Unit Pelaksanaan Teknisi (UPT) Pengelolaan Pendapatan Tembilahan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, 2020*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa peningkatan jumlah pendapatan daerah setiap tahunnya dipengaruhi oleh salah satu faktor yaitu peningkatan jumlah pendapatan pajak kendaraan bermotor. Peningkatan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor terus bertambah sepanjang 3 tahun terakhir yaitu pada tahun 2015 – 2017 namun pada tahun 2018 terjadi penurunan jumlah wajib pajak yang membayar pajak kendaraan motornya diinhil, salah satu penyebabnya adalah inhil merupakan kabupaten yang memiliki perkebunan kelapa dan sawit terbesar akibatnya banyak transportasi dipakai diperkebunan sehingga tidak lagi dipakai untuk aktivitas dikota. Selain itu sepanjang tahun 2018 adanya pembelian motor yang rendah yakni seseorang tinggal membayar uang muka mulai Rp.500.000 sudah bisa membawa pulang sepeda motor, akibatnya banyak pemilik kendaraan yang ternyata tidak mampu membayar angsuran pinjaman kredit, sehingga setelah motor itu ditarik oleh lembaga pembiayaan karena menunggak angsuran. Apabila motor sudah ditarik tentu saja pajaknya sudah tidak lagi dibayar. Namun pada tahun 2019 terjadi peningkatan jumlah wajib pajak yang membayar pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kendaraan bermotornya hal itu disebabkan karena diberlakukannya pemutihan denda pajak pada tahun 2019 yang dilakukan pada 15 oktober 2019 sampai dengan 14 desember 2019. Menurut Indra Putrayana selaku kepala Bapenda Riau, kebijakan Pemutihan denda pajak ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dalam menunaikan kewajiban pajak yang tertunda dan mengoptimalkan penerimaan pajak. Hal ini terbukti dengan sebanyak 72.859 unit kendaraan yang mengikuti penghapusan denda. Dan didominasi oleh kendaraan bermotor 54.831 unit diseluruh kabupaten dan kota yang ada di provinsi Riau. Di Indragiri Hilir sendiri sebanyak 3.218 wajib pajak kendaraan bermotor yang mengikuti penghapusan denda pajak (<https://riaupos.co/216705-berita-72848-unit-kendaraan-ikut-pemutihan-denda-pajak.html> diakses pada 25 Desember 2019), sehingga wajib kendaraan bermotor di Indragiri Hilir menjadi meningkat pada tahun 2019.

Tujuan utama adanya peningkatan pajak daerah adalah untuk mendorong perekonomian melalui pembangunan infrastruktur berupa sarana dan prasarana yang menunjang perekonomian. Dengan adanya pembangunan tersebut diharapkan perekonomian di daerah Indragiri Hilir bisa semakin berkembang dan tujuan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dapat terlaksana. Keseluruhan penerimaan pajak daerah tersebut memiliki peranan penting bagi pendapatan asli daerah kabupaten Indragiri Hilir yang diarahkan sebagai penggerak roda pemerintahan dan pembangunan daerah agar terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Berdasarkan gambaran dan uraian diatas, dapat diketahui bahwa pajak kendaraan bermotor komponen penting dalam penerimaan pendapatan asli daerah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan kajian untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dan pengaruh pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten Indragiri Hilir dengan judul: **“KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KANTOR UNIT PELAKSANAAN TEKNISI (UPT) PENGELOLAAN PENDAPATAN TEMBILAHAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU.”**

**1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Unit Pelaksanaan Teknisi (UPT) Pengelolaan Pendapatan Tembilahan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau?
2. Bagaimana perhitungan dan pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Unit Pelaksanaan Teknisi (UPT) Pengelolaan Pendapatan Tembilahan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau?

**1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui besarnya kontribusi PKB dan apakah perhitungan dan pencatatan pajak kendaraan bermotor di Kantor Unit Pelaksanaan Teknisi (UPT) Pengelolaan Pendapatan Tembilahan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau sudah berjalan dengan benar.

**1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Penelitian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Bagi pemerintah daerah kabupaten Indragiri Hilir, tugas akhir ini bisa menjadi bahan masukan dan referensi terhadap upaya-upaya yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Indragiri Hilir untuk meningkatkan penerimaan dan pendapatan asli daerah khususnya dari sektor pajak daerah atas pajak kendaraan bermotor.
- b. Bagi penulis, membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir agar dapat memperoleh gelar Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- c. Rujukan peneliti berikutnya, semoga penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan untuk pengembangan tentang ilmu pajak daerah atas pajak kendaraan bermotor karena pendapatan asli daerah merupakan pilar terpenting bagi suatu daerah dalam melaksanakan asas otonomi daerah sehingga semakin tinggi penerimaan pendapatan asli daerah suatu daerah, maka semakin kecil pula ketergantungannya kepada pemerintahan pusat.

**1. Teknik Analisis Data**

Metode analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, untuk menjelaskan prosedur pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. (Sedarmayanti dan Hidayat, 2011:33) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif bertujuan dalam pencarian fakta status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang dengan interpretasi yang tepat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **Prosedur Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tahap penelitian yang berhubungan dengan masalah yang teliti. Tahapan-tahapan tersebut yakni sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi permasalahan yang signifikan untuk dipecahkan melalui metode deskriptif/kualitatif
2. Merumuskan permasalahan yang jelas dan menentukan tujuan dan manfaat penelitian.
3. Mengumpulkan informasi berupa gambaran umum, fungsi, dan tugas instansi. Dan data berupa dokumen-dokumen peraturan Gubernur, dan laporan target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT Pengelolaan Pendapatan Tembilahan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
4. Melakukan analisis data yang diperoleh dengan menggunakan analisis deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis perhitungan dan pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Tembilahan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
5. Mengajukan kesimpulan yang logis berdasarkan hasil penelitian tersebut dan memberikan saran-saran pada UPT Pengelolaan Pendapatan Tembilahan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **Sistematika Penulisan**

Penulisan ini dibagi menjadi empat bab atau sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini peneliti membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Dalam bab ini berisikan tentang sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab serta aktivitas kantor.

### **BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

Pada bab ini berisikan penyampaian hasil temuan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, temuan-temuan tersebut mencakup tentang analisis data yang didapat dari “Kantor Unit Pelaksanaan Teknisi (UPT) Pengelolaan Pendapatan Tembilahan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau”

### **BAB IV : KESIMPULAN**

Pada bab ini peneliti membahas tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang disampaikan penulis dari hasil penelitian.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN

#### TEMBILAHAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU

##### 2. Sejarah Kantor UPT. Pengelolaan Pendapatan Tembilahan, Kelas A Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

Badan Pendapatan Propinsi Riau dibentuk berdasarkan surat Gubernur Riau Nomor KPTS Tanggal 29/1/1974 Tanggal 13 Januari 1974 tentang pembentukan Dinas Pajak dan Pendapatan Propinsi Riau. Kemudian sejalan dengan perkembangan keadaan dan untuk meningkatkan penyelenggaraan pungutan Daerah serta dalam rangka pelaksanaan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di daerah, maka di tetapkan pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Badan Pendapatan Propinsi Riau.

Kantor Samsat Tembilahan Kab. Inhil, berdiri pada tahun 1985 di jalan Diponegoro, kemudian pada tahun 1989 kantor samsat pindah ke jalan pendidikan No 9 bersama dengan Kantor Dinas Pendapatan Daerah. Kantor Samsat yang pada saat itu berdiri dari pimpinan dan dua kasi. Dari ketiga kepala seksi tersebut dapat diperincikan sebagai berikut :

1. Kepala Kantor
2. Kasi Tata Usaha
3. Kasi Penerimaan

Melihat perkembangan dari tahun ketahun Kantor Samsat atau Kantor Pendapatan Propinsi Riau mengalami perubahan nama pada tahun 2009 menjadi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

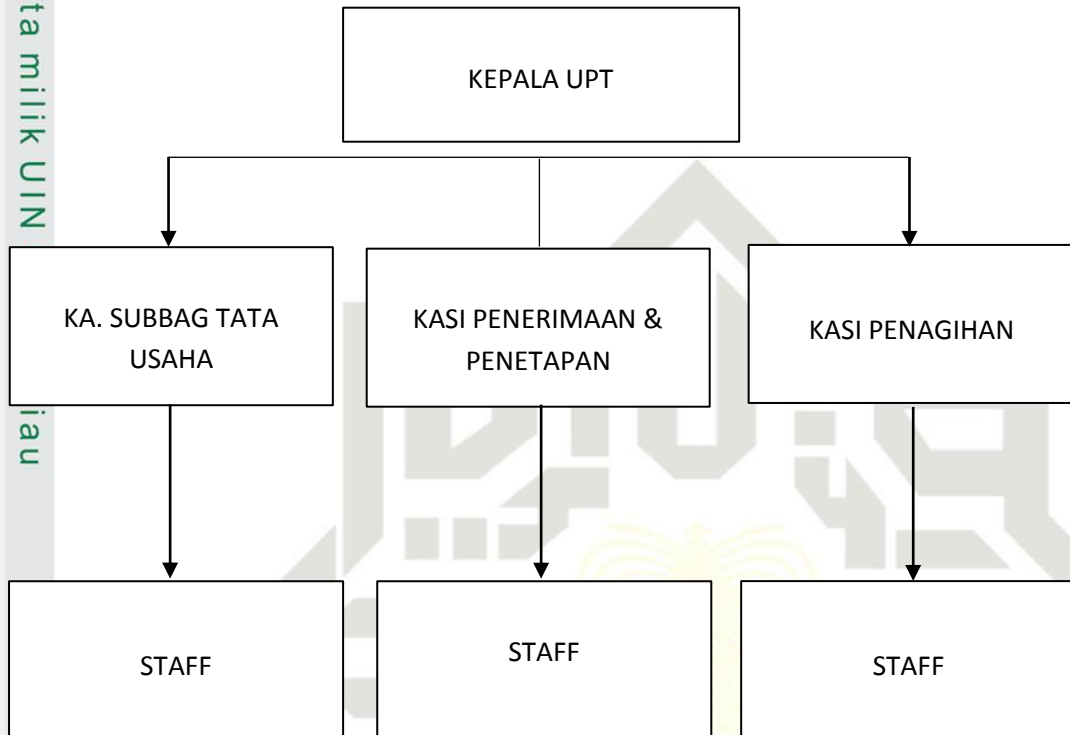
”UPT” (Unit Pelaksana Teknis) Pengelolaan Pendapatan Tembilahan Kab. Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dan penambahan kasi dan pegawai. Adapun beberapa kasi dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Kepala UPT
2. K.A. Subbag Tata Usaha
3. K.A. Kasi Penerimaan dan Penetapan
4. K.A. Pengawasan dan Pembukuan

UPT. Pengelolaan Pendapatan Tembilahan Kelas A, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau sebagai Unit Pengelola Teknis, pengelola pendapatan daerah, dalam upaya meningkatkan pelayanan langsung kepada masyarakat baik dalam pelaksanaan teknis maupun mendukung pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan Provinsi Riau dan meningkatkan pendapatan asli daerah secara optimal.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**GAMBAR 2.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN TEMBILAHAN,**  
**KELAS A BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU**



*Sumber: Kantor Unit Pelaksanaan Teknisi (UPT) Pengelolaan Pendapatan Tembilaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, 2020*



## 2.3 Visi dan Misi Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

### 2.3.1 Lokasi Geografis Kantor UPT. Pengelolaan Pendapatan Tembilahan, Kelas A Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

Kantor UPT. Pengelolaan Pendapatan Tembilahan, Kelas A Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau terletak di Jl. Pendidikan No.9 Tembilahan Hilir, Kab. Indragiri Hilir 29281, yang terletak dibelakang Kantor Pengadilan Negeri Tembilahan, di samping Kantor Dinas Kehutanan Tembilahan (sebelah kiri) dan disamping AKBID Puri Husada Tembilahan (sebelah kanan) dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah kecamatan Tembilahan. Tembilahan Hulu, Tembilahan Hilir, Tempuling, Kuala Indragiri, Kuala Enok, Batang Tuaka, Gaung dan Gaung Anak Serka.

#### a. Visi

Terwujudnya pendapatan daerah sebagai pendukung utama kelancaran roda penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Riau secara professional dan Kepuasan Pelayan Publik dan tercapainya Masyarakat yang Mandiri, Dinamis, dan Sejahtera.

#### b. Misi

1. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah secara optimal.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan public secara professional kepada masyarakat.
3. Memperoleh dana perimbangan secara adil sesuai potensi yang dimiliki.

## Uraian Tugas Bagian/ Unit Kerja Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

Adapun tugas pokok pada masing-masing Bagian pada Kantor UPT. Pengelolaan Pendapatan Tembilahan, Kelas A Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

### 1. Kepala UPT (Unit Pelaksanaan Teknis)

Mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau sebagian daerah kabupaten/kota dan bertanggung jawab kepada kepala dinas pendapatan. Tugasnya adalah :

- a. Melaksanakan pemungutan Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, AP) di wilayah kerja yang telah ditetapkan.
- b. Mengadakan kegiatan pelayanan SAMSAT dalam pengurusan PKB, BBN-KB, dan AP pada masyarakat.
- c. Melakukan koordinasi pada pihak yang terkait SAMSAT antara kepolisian Daerah dan PT. Jasa Raharja (Persero).
- d. Melaksanakan kegiatan teknis operasional pemungutan pendapatan asli daerah.
- e. Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait dengan pemungutan pendapatan asli daerah.
- f. Melaksanakan tugas ketatausahaan.
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Memberikan laporan segala kegiatan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya.
  - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## 2. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, bina program, hubungan masyarakat, hukum, organisasi, terlaksana dan keamanan.

Sub Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Menerima, Menganalisa, dan Mengendalikan administrasi surat-menyerat
- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan.
- c. Mengetik, mengolah, mencatat, serta mengatur klarifikasi dan mengadakan naskah dinas serta surat-menyerat
- d. Melaksanakan administrasi kepegawaian dan menghimpun serta menyusun inventarisasi data kepegawaian.
- e. Melaksanakan penyelesaian administrasi gaji pegawai.
- f. Menyusun rencana anggaran
- g. Menyusun rencana anggaran
- h. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan
- i. Mengatur dan mengkoordinir urusan rumah tangga pemeliharaan kantor dan keamanan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat urusan rumah tangga kehumasan dan kearsipan
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### 3. Kasi Pengelolaan Pendapatan

Mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan penyusunan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang pengembangan system informasi, pengolahan data pendapatan, pengembangan pelayanan pendapatan data dan pengembangan pendapatan.

Bidang pengelolaan Pendapatan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi penerimaan pendapatan daerah
- b. Melaksanakan pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan wilayah kerja UPT yang telah ditetapkan
- c. Mengkoordinasikan dan pengelolaan pelayanan SAMSAT
- d. Menyelenggarakan pengembanagn pelayanan di bidang pendapatan
- e. Melaksanakan perencanaan teknis dibidang penerimaan pendapatan daerah
- f. Membuat laporan realisasi penerimaan pajak daerah pada kantor SAMSAT disetiap harinya
- g. Melaksanakan pelayanan dibidang penerimaan pendapatan daerah
- h. Menerbitkan surat tagihan daerah (STPD)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Membuat laporan segala kegiatan-kegiatan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan

**4. Kasi Penagihan dan Pembukuan**

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan pekerjaan/kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi serta bimbingan administrasi Pajak Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan asli Daerah.

Kasi Penagihan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi pengawasan dan pembukuan
- b. Pelaksanaan pemungutan dan penagihan Pajak Daerah
- c. Melakukan penagihan pasif dan aktif atas piutang daerah
- d. Membuat daftar himpunan pembayaran dan tunggakan pajak daerah
- e. Menyusun laporan penerimaan pajak daerah
- f. Melaksanakan perencanaan teknis dibidang pengawasan dan pembukuan
- g. Melaksanakan pelayanan dibidangn pengawasan dan pembukuan
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dibidang pengawasan dan pembukuan
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **5. Bidang Kepolisian**

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan pekerjaan, kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak Daerah dan menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat.

Bidang Kpeolisian mempunyai fungsi :

- a. Menyusun petunjuk teknis operasional pemungutan/penagihan penerimaan pajak daerah
- b. Pendataan dan pemeriksaan kelengkapan syarat pembayaran pajak
- c. Melakukan pengesahan dalam persyaratan wajib pajak
- d. Melaksanakan kegiatan pengecekan fisik kendaraan
- e. Melaksanakan kegiatan scan data wajib pajak
- f. Melaksanakan kegiatan pencetakan bukti yang akan didapat oleh wajib pajak
- g. Mempersiapkan bukti dan membantu wajib pajak dalam menyelesaikan pembayaran pajak kendaraan
- h. Melakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan

## **6. Bidang Jasa Raharja**

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dan Kepolisian dalam menyelenggarakan urusan pekerjaan dan sebagai penanggung jawab untuk memberikan biaya atau Sumbangan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) untuk wajib pajak atau pengendara kendaraan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

1. Pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Indragiri hilir dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah, walaupun tidak signifikan dengan persentase rata-rata sebesar 11,97% , pemenuhan target pendapatan asli daerah di Kabupaten Indragiri Hilir tidak hanya berasal dari pendapatan pajak kendaraan bermotor namun juga dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang lain.
2. Perhitungan dan Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT Pengelolaan Pendapatan Tembilahan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau sudah dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Gubernur Riau Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perhitungan Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor.
3. Dalam pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor sudah sesuai dengan prosedur yang ada, dimana dalam pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor pun sudah sesuai dengan prosedur yang ada, dimana dalam pencatatan terdapat 3 (tiga) daftar catatan mengenai PKB, yaitu potensi/pbjek PKB yang dicatat atas dasar/hasil kegiatan pendataan dan pendaftaran, perincian penerimaan PKB menurut objek, dan perincian wajib pajak yang tertunggak lewat jatuh tempo pajak.
4. Hasil penelitian yang dilakukan pada UPT Pengelolaan Pendapatan Tembilahan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, diketahui

perhitungan besarnya pokok PKB diatur dalam Peraturan Gubernur Riau No.08 Tahun 2012. Perhitungan dan pencatatan PKB telah dilakukan secara komputerisasi mengingat jumlah dan jenis kendaraan bermotor semakin hari semakin banyak, adanya pajak progresif dimana merupakan pajak yang dikenakan untuk kepemilikan lebih dari satu jenis kendaraan bermotor yang telah ditetapkan.

#### 4.2 Saran

1. Disarankan kepada Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Tembilahan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau agar dapat memperthankan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat demi meningkatnya pendapatan dan sebisa mungkin meningkatkan tingkat efektivitas tersebut dengan melakukan sosialisasi/ penyuluhan terhadap wajib pajak agar mempunyai kesadaran untuk membayar pajak tepat waktu.
2. Disarankan kepada UPT Pengelolaan Pendapatan Tembilahan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dan pihak kepolisian hendaknya lebih memperhatikan dalam penertiban wajib pajak yang belum membayar Pajak Kendaraan Bermotor dengan melakukan pendataan jumlah kendaraan bermotor yang ada, dan melakukan razia kendaraan bermotor.
3. Disarankan kepada UPT Pengelolaan Pendapatan Tembilahan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau hendaknya lebih meningkatkan system pelayanan bagi wajib pajak melalui system aplikasi yang telah tersedia sehingga proses pelayana dapat dengan cepat diselesaikan, meningkatkan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fasilitas pelayanan seperti ruang tunggu yang nyaman dan sejuk bagi wajib pajak yang menunggu giliran membayar pajak.

4. Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk menjadikan penelitian ini sebagai referensi penelitian yang akan datang.



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- DAFTAR PUSTAKA**
- Hornngren.2012. *Accounting*. Peson International Edition. Upper Saddle River, New Jersey
- Kantor Unit Pelaksanaan Teknisi (UPT) Pengelolaan Pendapatan Tembilaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau,2020
- Mardiasmo.2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011,ANDI,Yogyakarta
- Milijono Djoko, Baruni Wicaksono. 2009. *Akuntansi Pajak Lanjutan*. ANDI, Yogyakarta
- Peraturan Gubernur Riau NO.8 Tahun 2012
- Pontoh, Winston. 2103. *Akuntansi Konsep dan Aplikasi*. Halaman Moeka, Jakarta
- Purwono, H. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Penerbit Erlangga
- RiauPos.co. 2019 “72.848 unit kendaraan ikut pemutihan denda pajak”  
<https://riaupos.co/216705-berita-72848-unit-kendaraan-ikutpemutihan-denda-pajak.html>. Diakses 25 Desember 2019
- Siahaan, Marihot. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Suandy, E. 2014. *Hukum Pajak Edisi 6*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Widuyoyo, 2011. *Perpajakan Indonesia*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## RIWAYAT HIDUP

*Nur 'Ainun lahir di Pekanbaru, 07 April 1999. Ayahanda bernama Yahya dan Ibunda bernama Mardiana. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara yakni Nurmayani, Nur 'Afni. Jenjang pendidikan dimulai dari TK BABUSSALAM pada tahun 2004, kemudian SDIT Raudhatur Rahmah pada tahun 2005 dan lulus pada tahun 2011. Melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 21 Pekanbaru dari tahun 2011-2014. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 12 Pekanbaru dari tahun 2014-2017. Pada tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikan Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan D-III Akuntansi.*

*Dengan berkat rahmat Allah SWT, Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **"Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kantor Unit Pelaksanaan Teknisi (UPT) Pengelolaan Pendapatan Tembilahan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau"** dibawah bimbingan Ibu Febri Rahmi, SE, M.Sc, Ak. CA. Pada tanggal 19 Mei 2020 dipanggil untuk mengikuti ujian munaqasah dan dinyatakan lulus dengan nilai yang sangat memuaskan dan menyandang gelar Ahli Madya (A. Md).*